

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat merupakan negara adidaya (*super power*) yang memiliki kemampuan ekonomi, militer, dan politik yang kuat untuk menentukan *bargaining position* (posisi tawar-menawar) dengan negara lain. Dalam bidang perekonomian, Amerika Serikat selalu menarik perhatian dunia dengan memiliki posisi yang strategis. Naik turunnya perekonomian Amerika, sangat mempengaruhi perilaku perekonomian global. Tidak sedikit negara didunia yang bergantung dengan Amerika Serikat sebagai kiblat perekonomiannya (Zaharna, 2009).

Amerika Serikat merupakan negara yang sering kali dianggap memiliki citra negatif, terutama menurut sudut pandang masyarakat muslim. Sentimen anti Islam pasca serangan 9/11 serta invasi Amerika Serikat ke negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim, dan keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik-konflik di negara-negara Islam, menjadi latar belakang masyarakat muslim internasional memiliki pandangan negatif terhadap Amerika Serikat. Citra Amerika Serikat menurun drastis pada masa pemerintahan George W. Bush, di mana sentimen anti-Amerika meningkat di negara-negara dengan penduduk mayoritas Islam. Walaupun pasca George W. Bush turun dari kekuasaannya pemerintah Amerika Serikat menggalakkan adanya diplomasi publik yang inovatif guna menarik simpati masyarakat muslim, citra Amerika Serikat masih berada pada tingkat yang rendah (Zaharna, 2009).

Berbeda dengan Bush, Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama memiliki fokus pada perluasan dan percepatan komunikasi dengan masyarakat internasional dengan pemanfaatan teknologi dan media sosial ke dalam diplomasi publik, yang di dalamnya mengedepankan transparansi dan keterbukaan, yang bertujuan membentuk citra positif Amerika Serikat terhadap dunia internasional khususnya masyarakat muslim (Fitriah & Haryanto, 2017). Amerika Serikat ingin adanya penegasan kembali nilai-nilai demokrasi di era digital

melalui *21st Century Statecraft*. Dalam usaha melaksanakan komitmen Obama dalam hal keterbukaan dan transparansi informasi di pemerintahan dan juga upaya peningkatan keterbukaan pemerintah di lingkup internasional dengan menggunakan teknologi termutakhir dan perangkat diplomasi tradisional, pemerintah Amerika Serikat membentuk adanya sebuah kebijakan *21st Century Statecraft*. Kebijakan tersebut juga merupakan stimulus yang dapat mendorong pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel (Departement of State of USA, 2010). Hal tersebut guna menarik simpati masyarakat muslim dunia bahwa Obama dapat menyelesaikan berbagai masalah pasca kebijakan represif Bush (Jiang, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan membahas tentang bagaimana pemerintah Amerika Serikat era Presiden Barack Obama dalam membentuk citra positif Amerika Serikat terhadap masyarakat muslim internasional menggunakan diplomasi digital atau *eDiplomacy*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut **“Bagaimana Amerika Serikat era Presiden Barack Obama memperbaiki citranya di Dunia Islam?”**

C. Kerangka Teori

Berdasarkan rumusan masalah yang telah terbentuk sebelumnya, maka guna memudahkan dalam mendeskripsikan dan memahami bagaimana Amerika Serikat era Presiden Barack Obama menggunakan *eDiplomacy* sebagai upaya perbaikan citra di Dunia Islam, penulis menggunakan alat analisa berupa kerangka teoritis sebagai landasan pemikiran yang relevan dengan permasalahan yang dimunculkan yaitu **Diplomasi Publik (*Public-Diplomacy*)**, dan konsep *eDiplomacy*.

1. Diplomasi Publik

Sebagai salah satu pengaplikasian dari konsep *soft power*, di mana upaya guna mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui *understanding, informing, and*

influencing foreign audience biasa dirumuskan sebagai sebuah konsep diplomasi publik (PDAA, n.d.). Dengan kata lain, diplomasi publik menekankan pada hubungan antara pemerintah dengan masyarakat atau hubungan antar masyarakat itu sendiri ketika proses diplomasi tradisional dikembangkan melalui mekanisme hubungan antar pemerintah. Sebagai landasan sosial bagi hubungan dan pencapaian kepentingan yang lebih tinggi, diplomasi publik bertujuan agar masyarakat internasional mempunyai persepsi yang positif tentang suatu negara.

Menurut Hans N. Tuch, penulis buku *Communicating With the World* mendefinisikan diplomasi publik sebagai berikut,

“...a government’s process of communicating with foreign publics in an attempt to bring about understanding for its nation’s ideas and ideals, its institutions and culture, as well as its national goals and politics.”(Melissen, 2005)

Sehingga dapat dimaknai bahwa diplomasi publik adalah sebagai sebuah proses bagaimana pemerintah memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negaranya kepada publik mancanegara. Lebih lanjut, menurut Melissen, diplomasi publik adalah bagaimana suatu negara mengubah cara pandang orang atau organisasi lain di luar negaranya dengan cara positif sebagai sebuah usaha dalam mendapatkan citra positif dari orang atau organisasi tersebut (Melissen, 2005).

Pemenuhan nilai-nilai fundamental dan tujuan keamanan nasional merupakan hal mendasar bagi pelaksanaan diplomasi publik dan komunikasi strategis bagi Amerika Serikat. Berdasarkan laporan dari *Policy Coordinating Committee*, terdapat empat nilai yang harus dijalankan dalam diplomasi publik dan komunikasi strategis antara lain:

- a. Mengedepankan komitmen kebebasan, hak asasi manusia, dan kesetaraan setiap manusia;

- b. Merangkul siapa saja yang memiliki pandangan serta nilai yang sama;
- c. Mendukung siapa saja yang turut memperjuangkan kebebasan dan demokrasi;
- d. Serta, menentang siapa saja yang turut mendukung dalam penyebaran nilai-nilai kebencian dan penindasan (Policy Coordinating Committee, 2007).

Demografis karakteristik masyarakat juga perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan diplomasi publik dan komunikasi strategis Amerika Serikat. Mereka yang rentan dalam paparan ideologi ekstremis adalah anak-anak muda, perempuan, dan minoritas. Diplomasi publik harus merambah ke anak-anak muda karena merekalah yang akan menjadi penerus bangsa. Melalui lembaga ini, diperlukan sebuah sarana yaitu pendidikan dan program pertukaran bagi para siswa yang berasal dari Timur Tengah atau tempat lain, serta penggunaan internet dan bentuk komunikasi lainnya (Policy Coordinating Committee, 2007).

Perempuan juga perlu dilibatkan sebagai target dari diplomasi publik Amerika Serikat. Beberapa studi telah menjelaskan bahwa perempuan yang teredukasi dan terberdaya, memiliki peran yang lebih efektif dalam melakukan *perubahan* sosial. Lebih dari dua-pertiga dari 70 juta orang di Timur Tengah merupakan perempuan, sehingga memberikan pendidikan bagi para perempuan dalam merupakan hal yang dinilai penting bagi kemajuan nilai-nilai kebebasan dan demokrasi (Policy Coordinating Committee, 2007).

Jangkauan diplomasi publik juga harus sampai kepada kelompok minoritas. Orang-orang dengan ras serta agama yang termarginalkan, orang-orang cacat, serta pribumi asli, sering kali tidak memiliki akses pendidikan dan ekonomi yang sama dengan mayoritas. Amerika Serikat merasa bahwa pengalaman yang dimilikinya dalam memberikan akses yang sama bagi minoritas, dinilai harus disebarluaskan secara luas di seluruh dunia melalui diplomasi publik (Policy Coordinating Committee, 2007).

Munculnya media sosial dan perkembangan arus komunikasi global yang semakin pesat memaksa adanya sarana baru dalam mengkomunikasikan diplomasi publik kepada masyarakat internasional. Diplomasi publik yang baru kemudian menggantikan komunikasi searah dari diplomasi publik sebelumnya dengan memanfaatkan keuntungan media sosial dan internet untuk mendirikan komunikasi dua arah dengan publik (Pamment, 2013).

2. *eDiplomacy*

Dewasa ini sosial media menjadi komponen penting dalam berdiplomasi. Perkembangan ini tentu saja mempengaruhi perilaku negara dalam pelaksanaan usaha mencapai kepentingan nasional, melalui praktik *diplomasi*. Diplomasi antar aktor dalam hubungan internasional telah bergeser dari praktik diplomasi tradisional, menjadi diplomasi yang menggunakan teknologi dan informasi untuk mencapai kepentingannya.

Terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan *komunikasi*, *eDiplomacy* juga membawa perubahan yang penting kepada diplomasi publik kontemporer. Craig Hayden menyebutkan,

“Government are now in need of a new public diplomacy that contends with a global media ecology characterized by a fragmentation of audiences to networks of selective exposure. In this media ecology, the goal of public diplomacy is transformed from the transmission of information to the building and leveraging of long-lasting relationship with foreign public.”(Hayden, 2012).

Diplomasi digital menjadi alat baru dalam diplomasi publik. Dalam hubungan internasional, dunia maya menjadi sarana dalam berbagi informasi, berkomunikasi, bahkan *lebih* jauh, berperang (Duncombe, 2017). Bjola dan Holmes (2015) mendefinisikan konsep *eDiplomacy* atau diplomasi digital adalah sebuah pengembangan dari konsep diplomasi publik atau *soft power*. Sebagai alat diplomasi, negara

menggunakan berbagai macam platform media sosial, situs web, serta aplikasi digital (Bjola & Holmes, 2015). Menurut Berridge (2012) *eDiplomacy* dapat didefinisikan sebagai sebuah proses diplomasi dengan menggunakan media teknologi komunikasi dan informasi elektronik, atau internet.

Guna melakukan restrukturisasi diplomasi dalam konteks yang baru dan lebih berbeda dari sebelumnya, para diplomat dan praktisi komunikasi menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram dan lain sebagainya (Fitriah & Haryanto, 2017). Pada konteks baru yang dimaksud adalah para diplomat tentu saja tidak mengubah perannya dalam melihat diplomasi secara tradisional, akan tetapi mencoba untuk melakukan ekspansi jangkauan serta melakukan *eksplorasi* lebih lanjut tentang inovasi-inovasi baru guna mencapai kepentingan mereka dalam dunia internasional (Sandre, 2013).

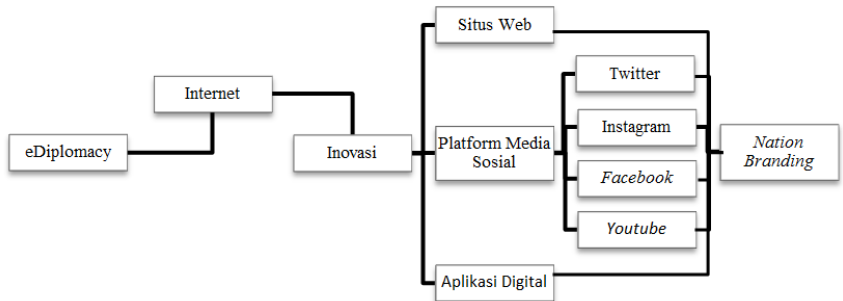
Menurut Kuźniar dan Filimoniuk diplomasi pada era Web 2.0 dengan pemanfaatan media sosial, telah *menciptakan* dogma diplomatik baru antara lain:

- a. Memuat opini tentang isu-isu internasional;
- b. Menyederhanakan pernyataan diplomatik (informasi menjadi lebih interaktif, lebih pendek dan lebih mudah diakses dengan menggunakan klipng, tagar, dan emoji);
- c. Menggeser komunikasi politik ke platform yang tersedia untuk umum (ini memberi pengguna Twitter kesempatan untuk mengamati dan mengendalikan *eDiplomasy* dengan menggunakan alat Twitter);
- d. Terhubung dengan masyarakat luas dengan menggunakan berbagai aplikasi multimedia (Kuźniar & Filimoniuk, 2018).

eDiplomacy dapat diartikan sebagai bagian dari usaha guna memperkuat *nation branding*. Dalam proses *branding* negara bekerja sama dengan lembaga *pemangku* kepentingan secara horizontal dengan cabang pemerintah dan secara vertikal dengan perwakilan negara atau kedutaan dan diplomat. *eDiplomacy* dapat secara konsisten menjaga citra yang dipromosikan suatu negara karena sesuai dengan realitas. Hal tersebut dikarenakan konten yang dibagikan

melalui berbagai platform media sosial langsung terlibat dengan tujuan politik *luar* negeri dan aksi nyata yang dilakukan oleh negara dalam sebuah arena global (Manor & Segev, 2015).

Secara *operasional*, untuk memahami definisi dari *eDiplomacy* dapat dilihat melalui bagan seperti di bawah:



Gambar 1. 1 Bagan Definisi Operasional eDiplomavy

Disarikan dari berbagai sumber

Melalui media sosial, Amerika Serikat melakukan *branding* dengan memberikan narasi-narasi sebagai negara “contoh” bagi dunia. Keinginan untuk menjadi “kompas” moral dunia yang memimpin dengan memberikan contoh, terlihat jelas dalam unggahan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sepanjang Januari 2016 di Facebook yang menyatakan bahwa “*Part of the mission of the U.S. Department of State is to share America’s story. One of the most noteworthy elements of this story is the importance the United States places on diversity and religious pluralism*”. Melalui unggahan ini menegaskan bahwa Amerika Serikat adalah sebuah negara yang memiliki keberagaman kelompok, identitas, serta budaya, yang berkumpul menjadi satu dan mengedepankan kejujuran, rasa tenggang rasa, dan dialog (Manor, 2017).

D. Hipotesis

Amerika Serikat era Presiden Barack Obama memperbaiki citranya di Dunia Islam adalah dengan mengimplementasikan *eDiplomacy* melalui:

1. Kebijakan *21st Century Statecraft* sebagai upaya penyebaran nilai-nilai Amerika Serikat melalui inovasi-inovasi digital sebagai pelengkap diplomasi publik tradisional;
2. Pemanfaatan media sosial untuk melakukan komunikasi dua arah dengan masyarakat Dunia Islam.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif di mana penulis menggunakan analisa yang bersifat deskriptif. Penelitian ini ingin menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menerjemahkan kondisi-kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Berdasarkan jenis penelitian maka jenis data yang digunakan penulis adalah data-data kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* yang di maksud adalah penulis menggunakan literatur dan *online research* yang relevan dengan topik yang diangkat. Data yang dikumpulkan di antaranya adalah literatur mengenai studi Islam, Diplomasi Publik, dan *eDiplomacy* di Amerika Serikat, di jurnal internasional, publikasi berita mengenai politik luar negeri AS yang berkaitan dengan *eDiplomacy* dari media *online* internasional maupun *website* resmi, serta produk-produk *eDiplomacy* yang telah dipublikasikan oleh pemerintah Amerika Serikat seperti *website*, *blog*, dokumen resmi, dan akun media sosial.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini diperlukan adanya jangkauan penelitian mengenai Bagaimana Amerika Serikat era Presiden Barack Obama memperbaiki citranya di Dunia Islam, penulis mengambil kurun waktu 2009 hingga 2017.

G. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk:

1. Melakukan analisa terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat era Presiden Barack Obama di Dunia Islam;
2. Melakukan analisa pengaruh perkembangan media digital terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Barack Obama untuk melakukan perbaikan citra di Dunia Islam;
3. Melakukan analisa terhadap penyebaran nilai-nilai Amerika Serikat ke Dunia Islam melalui media digital.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan terbagi menjadi lima bab dengan **Bab I** berisi latar belakang mengapa permasalahan muncul, perumusan masalah, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada **Bab II** membahas bagaimana dinamika hubungan Amerika Serikat dan Dunia Islam. Selanjutnya di **Bab III** membahas mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi diplomasi publik Amerika Serikat. **Bab IV** membahas upaya Barack Obama menggunakan *ediplomacy* untuk memperbaiki citra AS di mata masyarakat muslim dunia dengan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui kebijakan *21st Century Statecraft* dan media sosial. Pada bab terakhir yaitu **Bab V Penutup** merupakan Bab terakhir yang menyimpulkan isi materi penulisan penelitian ini yang dirangkum dari bab-bab sebelumnya. Bab ini juga berisi kritik dan saran untuk keberlanjutan penelitian ini.